

ABSTRAK

Korban penyalahgunaan narkotika dalam amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat (3), korban penyalahguna narkotika menjalani rehabltasi, akan tetapi pada realitanya korban langsung dikenakan hukuman pidana, sehingga terdapat ketidak sesuaian sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dengan peraturan perundang-undangan, Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkotika saat ini belum mewujudkan keadilan, Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkotika saat ini, serta bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkotika sistem dalam mewujudkan keadilan religius. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di mana korban penyalahgunaan narkotika dikenakan rehabilitasi, akan tetapi implementasinya korban penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 112 dan mendapatkan sanksi hukuman pidana bukan rehabilitasi, sehingga perlu dilakukan rekontruksi aturan hukum serta pemberian terhadap sistem penegakan hukum agar terciptanya suatu keadilan secara religius.

Kata Kunci : Rekontruksi, Narkotika, Sanksi, Penegakan Hukum, Religius

ABSTRACT

Victims of narcotics abuse in the mandate of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics Article 127 Paragraph (3), victims of narcotics abusers undergo rehabilitation, but in reality victims are immediately subjected to criminal penalties, so there is a non-compliance with the law enforcement system carried out by the authorities with regulations In the issues raised include why the criminal sanctions policy and actions in the enforcement of narcotics crime have not yet brought about justice, how are the weaknesses in the criminal sanctions policy and actions in the current enforcement of narcotics crime, and how reconstruction of criminal sanctions policies and actions in the enforcement of the narcotics crime control system in realizing religious justice. In order to answer the problem, the approach method used is Sociological Juridical, which is based on legal norms and existing legal validity theories. Related to the laws and regulations governing narcotics is Law Number 35 Year 2009 concerning narcotics in which victims of narcotics abuse are subject to rehabilitation, but the implementation of victims of narcotics abuse is subject to Article 112 and sanctions are not punishable by criminal penalties rather than rehabilitation, so it is necessary to reconstruct the rules law as well as revamping the law enforcement system in order to create a religious justice.

Keywords: Reconstruction, Narcotics, Sanctions, Law Enforcement, Religious